

KORAN
DIGITAL

radar.

EDISI SABTU
30 SEP 2023

MEDIA

T E R D E P A N



**PJ GUBERNUR KALTIM DILANTIK 2 OKTOBER DI JAKARTA,
AKMAL MALIK DIKABARKAN SUDAH
PESAN BAJU UNTUK PELANTIKAN**



**ISRAN NOOR BUKA KEGIATAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN DAN ORIENTASI PPPK**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 September 2023

Yth. (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Nomor : 100.2.1.3/5230/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Undangan

Dalam rangka Pelantikan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, bersama ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

hari/tanggal : Senin / 2 Oktober 2023
pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C, Kemendagri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
pakaian : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Peci Nasional TNI/Polri : PDU IV

Dimohon untuk dapat hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Atas keahadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Sahajir Charito, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri.

PJ GUBERNUR KALTIM DILANTIK 2 OKTOBER DI JAKARTA, AKMAL MALIK DIKABARKAN SUDAH PESAN BAJU UNTUK PELANTIKAN

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah mengeluarkan undangan resmi untuk pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yang akan dilaksanakan Senin, 2 Oktober 2023 di Sasana Bhakti Praja (SBP), Lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat. Pelantikan akan digelar pada pukul 08.00 WIB sampai selesai.

Dalam undangan resmi yang juga diterima Redaksi Mediakaltim.com, pelaksanaan pelantikan Pj Gubernur Kaltim akan digelar bersamaan dengan Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam undangan ini juga mencantumkan lampiran berupa daftar nama-nama pejabat dan tokoh penting yang diundang. Khusus Pelantikan Pj Gubernur Kaltim, Kemendagri mengundang Isran Noor selaku Gubernur Kaltim dan Hadi Mulyadi, selaku Wakil Gubernur Kaltim beserta istri.

Sementara pejabat yang diundang di antaranya seluruh Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Forkopimda Kaltim dan Bupati/Walikota se-Kaltim.

"Undangan pelantikannya memang sudah disebar dan diterima para penerima undangan. Pelantikan akan dilaksanakan 2

Oktober 2023. Pak Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Red.) sepertinya sudah ditetapkan Mendagri menjadi Pj Gubernur Kaltim. Kalau untuk surat keputusan Mendagri, salinannya baru bisa dilihat Senin (2/10) nanti," beber sumber Media Kaltim di Kemendagri. "Malah saya dengar dari Pemprov Kaltim sudah pesankan baju untuk pelantikannya," sambungnya.

Seperti diberitakan, Mendagri dikabarkan telah menunjuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, sebagai Pj Gubernur Kaltim menggantikan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang masa

jabatannya berakhir 30 September 2023, besok.

Sumber dari Media Kaltim di Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penunjukan Akmal Malik sudah dapat dianggap sebagai keputusan final.

Hal ini juga diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPD RI asal Kaltim, Mahyudin, kepada Media Kaltim pada Senin (25/9). "Saya mendengar bahwa Pak Akmal yang sudah ditunjuk. Namun, saya juga belum melihat Surat Keputusannya," kata Mahyudin.

Seperti diketahui, DPRD Kaltim telah mengirimkan lima nama sebagai usulan untuk Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim pada tanggal 8 September 2023 lalu.

Dari kelima nama yang diusulkan oleh DPRD Kaltim salah satunya adalah Dr. Akmal Malik, M.Si. Sementara empat nama lainnya yakni Drs. H. Alimuddin, M.Si (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama), Dr. Sri Wahyuni, M.PP (Sekwilprov Kaltim), dan Prof. Dr. Abdunnur, M.Si (Rektor Unmul).

Namun hingga saat ini, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengaku belum menerima kepastian mengenai siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim. Hasanuddin menyatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu keputusan dari Presiden RI yang akan dikeluarkan melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Sampai saat ini kami juga masih belum menerima kabar lebih lanjut, jadi ini masih dalam tahap penantian," ungkap Hasanuddin setelah memimpin Rapat Paripurna pada Senin, 25 September 2023 lalu.

Namun demikian, ia, yang biasa disapa sebagai "Hamas," yakin bahwa akan ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait Penjabat Gubernur Kaltim ketika masa jabatan Isran-Hadi berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023 mendatang.

"Tanggal 2 Oktober, seharusnya

**Mendagri
dikabarkan
telah menunjuk
Direktur
Jenderal
Otonomi Daerah
Kemendagri,
Akmal Malik,
sebagai
Pj Gubernur
Kaltim
menggantikan
Gubernur Kaltim
Isran Noor
dan Wakil
Gubernur Kaltim
Hadi Mulyadi,
yang masa jabatannya
berakhir 30 September 2023, besok.**

ya sudah ada keputusan, karena jika tanggal 1 Oktober jatuh pada hari Minggu, kita hanya tinggal menunggu surat dari Mendagri," tegas Politisi Golkar tersebut.

BIROKRAT BERPENGALAMAN

Berdasarkan berbagai referensi yang dikumpulkan oleh Media Kaltim, sosok Akmal Malik adalah seorang birokrat yang lahir pada 16 Maret 1970 di Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatra Barat.

Akmal telah meraih banyak prestasi cemerlang dalam karier birokratisnya. Bahkan selama satu tahun terakhir, mulai 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, Akmal dinilai sukses menjalankan amanah dari Mendagri sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Saat ini, Akmal masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, posisi yang telah diemban sejak 9 September 2019.

Akmal Malik memulai pendidikannya di Sekolah Ting-

gi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, di mana ia meraih gelar Diploma III pada tahun 1993.

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, meraih gelar S-1 Manajemen Pembangunan pada tahun 1996.

Tidak berhenti di situ, Akmal kemudian menggapai gelar Magister Sains (S-2) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Prestasi akademiknya tak berhenti di situ, pada tahun 2021, Akmal Malik meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya.

Karier Akmal Malik dalam pelayanan publik juga mengukir banyak prestasi. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, ia telah memiliki pengalaman berharga dalam berbagai posisi kunci.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian Setditjen Otonomi Daerah.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah dari tahun 2018 hingga 2019. Tidak hanya dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik juga memiliki pengalaman sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Pada periode 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, ia berhasil memimpin Sulawesi Barat dengan penuh dedikasi.

Sebagai seorang birokrat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat, Dr. Akmal Malik dianggap sebagai pemimpin yang mampu menghadapi tantangan dalam mengelola otonomi daerah.

Selama masa jabatannya, ia telah berperan aktif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan yang berdampak pada kemajuan daerah dan masyarakat. (MK)

Penulis/Editor: Agus Susanto



Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti, MM

DESEMBER 2023, SELURUH SKPD DI KALTIM WAJIB IMPLEMENTASIKAN APLIKASI SRIKANDI

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus giat melakukan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai langkah untuk meningkatkan pengarsipan dan administrasi pemerintahan di Kaltim.

"Dalam menghadapi tantangan IKN (Indonesia Kawasan Nusantara) ke depan, pada bulan Desember 2023, targetnya adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Kaltim, wajib mengimplementasikan aplikasi Srikandi ini," ujar Dewi Susanti, MM, Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim.

Penggunaan Aplikasi Srikandi diwajibkan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Dengan tahun 2024, pemerintah pusat akan beralih ke IKN,

maka kita harus sudah menerapkan aplikasi ini sebagai bagian dari percepatan administrasi dan pengarsipan. Ini adalah amanah presiden dalam percepatan pengambilan keputusan, yang hanya perlu diakses dan dikerjakan melalui ponsel pintar atau perangkat Android," tambahnya.

Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sehingga aspek keamanannya telah dijamin.

"Tentang masalah keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara telah menjaminkannya, sehingga tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Setiap pegawai yang telah di SK-kan oleh Sekretariat Daerah (Setda) wajib memiliki akun Srikandi, dan masing-masing akan memiliki kode

sandi dan kata sandi tersendiri," ungkap Dewi.

Dengan implementasi Aplikasi Srikandi oleh seluruh perangkat pemerintahan, banyak manfaat dan percepatan akan terjadi dalam hal administrasi dan pengarsipan. Hal ini memungkinkan akses dari mana saja, bahkan ketika pimpinan berada di luar kota.

"Dengan Aplikasi Srikandi, urusan surat-menyurat dan pengarsipan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Tidak akan ada lagi alasan bahwa pimpinan sedang berada di luar kota, karena semua terhubung langsung melalui perangkat seluler pegawai, mulai dari tingkat paling bawah hingga pimpinan," jelasnya.

Dewi juga mengungkapkan bahwa Aplikasi Srikandi telah mencapai versi 2, dan kemungkinan akan terus dikembangkan menjadi Aplikasi Srikandi versi 3.

(Han/ADV)

Pewarta: Hanaf

Editor: Agus Susanto

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**BPSDM KALTIM**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMDra. Nina Dewi
KEPALA DINAS BPSDM KALTIM

Foto bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, Hadi Mulyadi, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, MAP, Narasumber Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, Kepala BPSDM Kabupaten Kota Se-Kaltim, Kepala SMK/ SMA/MA, peserta pengembangan kompetensi ASN, dan peserta orientasi PPPK.

ISRAN NOOR BUKA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN ORIENTASI PPPK

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor, membuka acara Pengembangan Kompetensi Aparat Sipil Negara (ASN) dengan tema "Kepemimpinan Adaptif di Era Disruptif" bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas ASN di Lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kaltim. Acara ini juga menjadi bagian dari pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kegiatan ini digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan dilaksanakan pada Jumat (29/9/2023) di Hotel Mercure Samarinda.

Selain Gubernur Kaltim, hadir pula dalam acara ini Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, MAP, Narasumber Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, Kepala BPSDM Kabupaten Kota Se-Kaltim, Kepala SMK/SMA/MA, peserta pengembangan kompetensi ASN, dan peserta orientasi PPPK.

Acara yang secara resmi dibuka oleh Gubernur ini juga menghadirkan acara webinar dari Founder Rumah Perubahan, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, yang diundang khusus untuk memeriahkan pembukaan. Acara ini juga dipandu oleh Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Dr. Moh. Jauhar Efendi, M.Si.

Dalam sambutannya, Kepala

BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, MPA, menyatakan bahwa pengembangan kompetensi adalah hak bagi ASN. Bagi PNS, paling tidak 20 JP per tahun, dan bagi PPPK, maksimal 24 JP per tahun. Namun, ke depannya, pengembangan kompetensi ASN akan menjadi suatu kewajiban.

Oleh karena itu, BPSDM Kaltim, sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam hal penyelenggaraan pengembangan SDM, merasa terpanggil untuk menyelenggarakan berbagai bentuk dan jenis pengembangan sumber daya manusia yang bervariasi sesuai kebutuhan ASN dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten.

"Bapak Gubernur Kalimantan Timur dan hadirin yang berbahagia, kedepannya pengembangan kompetensi ASN itu adalah suatu kewajiban. Oleh sebab itu, BPSDM Kaltim siap menyelenggarakan kegiatan dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten," ujarnya.

Selanjutnya, acara pembukaan mengundang Gubernur Kaltim, Isran Noor, untuk memberikan sambutan dan membuka acara.

Dalam sambutannya, Isran Noor menyatakan bahwa pengembangan kompetensi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi di Provinsi Kaltim sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke-

pada masyarakat Kalimantan Timur.

"Hadirin yang Berbahagia, kapasitas dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan ASN kita dianggap paripurna dan mumpuni, namun di zaman sekarang, di era kemajuan teknologi dan berbagai isu-isu nasional dan internasional, kita harus terus dapat meng-update dan memperbarui wawasan dan pengetahuan kita," ucapnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur juga meminta izin pamit karena masa jabatan mereka akan segera berakhir pada bulan Oktober ini.

"Sebagai manusia biasa, saya sebagai Hadi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran para Pejabat dan seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh Rakyat Kaltim jika selama memimpin terdapat khilaf dan kesalahan," ungkapnya, yang kemudian disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Akhir sambutan Gubernur Kaltim, Isran Noor, adalah ucapan selamat kepada semua peserta yang akan mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan ASN di Lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



TPA BULUMINUNG TERIMA SAMPAH IKN, PEMKAB PPU MINTA KLHK BERI BANTUAN



**RAPERDA RTRW PPU HARUS
MEMBERIKAN NILAI TAMBAH
SEIRING PEMINDAHAN IKN**



Robbi/MediaKaltimGroup

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat rapat koordinasi bersama DLH PPU dan KLHK via daring, Jumat (29/9/2023).

TPA BULUMINUNG TERIMA SAMPAH IKN, PEMKAB PPU MINTA KLHK BERI BANTUAN

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memastikan akan ada peningkatan pengelolaan sampah di daerahnya. Untuk memenuhi kekurangan saran dan prasarana, ia juga akan meminta bantuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Permohonan bantuan itu bahkan telah ia sampaikan ke Dirjen LHK dalam zoom meeting, Jumat (29/9/2023). Sebagai pimpinan baru di Benuoa Taka, Makmur ingin agar persoalan masalah penanganan dan pengelolaan sampah yang ada saat ini di PPU tertangani dengan baik.

“Apalagi PPU merupakan kawasan utama penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabupaten PPU harus menjadi model percontohan daerah yang mampu mengelola sampah dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan ini. termasuk juga sampah yang ada di Puskesmas tidak langsung dimusnahkan.

“Ternyata puskesmas-puskesmas yang ada masih banyak yang menyimpan bekas alat suntik, tidak langsung dimusnahkan, sebab tidak ada tempat pemusnahannya. Ini harus kita atasi.”

“Pembangunan di IKN selama ini tak boleh mengganggu sirkulasi udara dan lingkungan di PPU. Masyarakat harus Kita edukasi agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih,” sambung Makmur.

Belum lagi, mengingatkan bahwa pembuangan sampah yang ada di IKN pada akhirnya memerlukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di ka-

wasan Kabupaten PPU. Seperti yang telah berjalan selama ini, TPA Buluminung yang turut melayani pembuangan sampah dari pembangunan IKN.

“Ternyata sampah yang ada di IKN ada sebagian di buang ke TPA Kita. Dan Kita tau bahwa TPA yang ada di Kabupaten PPU masih terbatas. Hal ini perlu kita formulasi jalan keluarnya,” katanya.

Maka dari itu, Makmur meminta DLH PPU untuk bisa mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan. Guna penanganan sampah dan agenda penghijauan yang ada di Kabupaten PPU.

“Saya mohon DLH nanti menyampaikan apa saja yang dibutuhkan, kemarin saya berkomunikasi dengan Menteri LHK bahwa kita akan banyak menanam mangrove, dan beliau sangat mendukung,” tutupnya. (SBK)



RAPERDA RTRW PPU HARUS MEMBERIKAN NILAI TAMBAH SEIRING PEMINDAHAN IKN

PPU – Pembahasan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Penajam Paser Utara (PPU) kembali bergulir. Menyesuaikan Ibu Kota Nusantara (IKN), penyusunan tata ruang di Benuo Taka diarahkan untuk memberikan keuntungan lebih.

Pemkab PPU telah menggelar rapat konsultasi publik tahap II (KP2), Jumat (29/9/2023). Terkait tanggapan terhadap materi muatan draft dokumen RTRW, Raperda dan KLHS Revisi RTRW PPU.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara Nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan yang berfungsi untuk melihat struktur ruang pada kota/kab.

“Perda RTRW dan Perlada RDTR sangat fundamental perannya bagi pembangunan. Keduanya terkait dengan aspek perijinan, investasi dan pembangunan di daerah, apalagi pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023,” ujarnya.

RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu

memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional.

Maka dari itu, perubahan RTRW PPU diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yaitu pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku.

“RTRW ini harus bisa memberikan nilai tambah bagi PPU ditengah kehadiran IKN,” sebutnya.

Selain RTRW, terdapat juga perencanaan yang lebih detail yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perbedaannya yaitu RTRW merupakan arahan dalam memanfaatkan ruang, sedangkan RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota atau kabupaten.

“Sebagai contoh, apabila Pemerintah Pusat menyusun blueprint pembangunan tol dari Balikpapan sampai ke IKN misalnya. Saya akan coba meminta agar exit-tolnya bisa sampai ke PPU, oleh karena itu kita perlu ‘mapping’ sebaik mungkin sehingga tidak ada masalah di kemudian hari dan pending issue,” pungkas Makmur. **(SBK)**



KEBAKARAN DI DESA REMPANGA, DELAPAN RUMAH HANGUS JADI ARANG



**WABUP KUKAR SERAHKAN PULUHAN
MESIN DIESEL DAN PERAHU FIBER**



KEBAKARAN DI DESA REMPANGA, DELAPAN RUMAH HANGUS JADI ARANG

TENGGARONG — Musibah kebakaran melanda RT 7 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar). Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.45 WITA ini telah menghancurkan delapan bangunan rumah warga, termasuk dua rumah mengalami kerusakan sedang.

Sebanyak empat unit mobil dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Matan Kukar dan dua unit mobil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuker, segera dikerahkan ke lokasi. Lebih dari 50 personel turut serta dalam upaya pemadaman, dibantu oleh puluhan relawan dari Balakarcana di sekitar Tenggarong dan Loa Kulu.

“Kendala yang dihadapi adalah angin kencang dan sebagian besar bangunan terbuat dari kayu,” ungkap Kepala Damkar Matan Kukar, Fida Hurasani, pada Jumat (29/9/2023).

Sementara itu, Ridwan, salah satu korban yang rumahnya hangus dilalap si jago merah,

hanya bisa meratapi nasibnya. Ketika kebakaran terjadi, ia hanya berhasil menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan baju yang ada di tubuhnya.

“Saya membawa dokumen dan baju yang saya pakai. Dompot pun tertinggal,” ujarnya dengan nada sedih.

Menurutnya, api bermula dari rumah tetangganya yang bernama Anwar. Ketika anaknya berteriak melihat api di dapur, ia melihat api telah meluas dari rumah Anwar, tetangga sebelah.

“Saya melihat api membesar dari jendela dapur,” tambahnya.

Api akhirnya dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 45 menit dan operasi pendinginan berlanjut hingga pukul 18.00. Para korban kebakaran saat ini terpaksa mengungsi sementara di rumah kerabat di sekitar lokasi kejadian.

Penulis: Muhammad Rafi'i

Editor: Agus Susanto



Istimewa

Wabup Kukar, Rendi Solihin, saat menyerahkan bantuan sektor perikanan di Kecamatan Muara Badak.

Wabup Kukar Serahkan Puluhan Mesin Diesel dan Perahu Fiber

TENGGARONG - Puluhan infrastruktur perikanan terus digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pembup Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar. Kali ini, menyasar nelayan dan pembudidaya ikan yang berada di Kecamatan Muara Badak.

Total 84 unit mesin diesel dan perahu fiber, yang diserahkan langsung Wabup Kukar, Rendi Solihin. Diperuntukkan untuk enam Kelompok Usaha Bersama. "Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena kita ketahui bantuan ini merupakan hal krusial bagi penerima manfaat," kata Rendi.

Untuk itu, pemerintah gencar turun ke lapangan untuk menjaring nelayan dan pembudidaya produktif agar Kukar tak terus menerus bergantung pada sektor pertambangan untuk menunjang perekonomian.

Sebagaimana diketahui, struktur ekonomi Kukar sebagian besar didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, mencapai 62,82 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan baru mencapai kurang lebih 13,33 persen.

Maka dari itu, ketergantungan perekonomian Kukar dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dilakukan dengan strategi transformasi ekonomi

dengan berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Kukar di bawah kepemimpinan Edi Damansyah-Rendi Solihin telah menyusun 23 program prioritas pada visi dan misi Kukar Idaman.

"Untuk bidang kelautan dan perikanan, juga sudah disusun dengan jelas, meliputi fasilitas sarana dan prasarana untuk 25.000 nelayan dan pembudidaya perikanan produktif, dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran," ucap Rendi.

Rendi berharap agar berbagai peralatan yang diserahkan kepada kelompok nelayan dapat dimanfaatkan bersama-sama. Dan, Rendi meminta peralatan yang telah disalurkan dapat dirawat agar dapat digunakan dalam jangka waktu lama.

"Bantuan perikanan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh kelompok penerima bantuan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah agar ini dapat dipelihara dengan baik sehingga umur dan pemanfaatannya lebih lama," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i**Editor : Agus Susanto**



Wabup Kukar, Rendi Solihin. (Istimewa)

Dorong Peningkatan Sektor Perikanan, Wabup Rendi Serahkan Ratusan Infrastruktur Perikanan

TENGGARONG - Bantuan sektor perikanan, terus disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Kali ini menyasar kelompok nelayan dan pembudidaya perikanan yang berada di Kecamatan Anggana. Bahkan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, turun langsung menyerahkan ratusan sarana perikanan.

Sebanyak 130 unit mesin diesel dan mesin ketinting, serta 100 unit cool box, diserahkan Rendi kepada 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Yang berada di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Sebagai realisasi program dedikasi Kukar Idaman pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya bagi 25.000 nelayan dan pembudidaya produktif se-Kukar.

"Agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas perikanan masyarakat, dan harapannya dapat meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan bagi nelayan dan keluarganya," jelas Rendi.

Ini menjadi salah satu dari empat program unggulan sektor perikanan yang sedang dijalankan Pemkab Kukar. Diantaranya Program Nelayanku Hebat, Program Ikanku Lestari, Program Mandiri Benih dan Program Rumput Laut Bersinar. Ini dianggap mencakup semua sektor perikanan di Kukar, baik dibidang perikanan, baik dari sisi nelayan, pembudidaya, benih, hingga ke rumput laut.

Bagaimana tugas pemerintah dalam meningkatkan kemandirian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. "Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, serta membawa manfaat bagi kemajuan daerah kita, demi mewujudkan masyarakat khususnya nelayan yang sejahtera dan berbahagia," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Agus Susanto



Komisi IV DPRD Kukar Terus Dorong Pengadaan Seragam Gratis

TENGGARONG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung terpengaruh oleh peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar tahun 2023. APBD-P Kukar 2023 telah disahkan sebesar Rp 11,8 triliun, dengan alokasi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

Dalam rangka mendukung sektor pendidikan Kukar, DPRD Kukar terus berupaya untuk meningkatkan manfaat bagi warga di bidang ini. Salah satu langkah yang diambil adalah mengusulkan regulasi mengenai pengadaan seragam gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Langkah ini diambil untuk mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

"Kami telah berkomunikasi dengan Disdikbud Kukar untuk menyusun regulasi terkait dengan pemberian seragam sekolah secara gratis kepada siswa. Kami ingin memastikan apakah hal ini dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Ahmad Zulfiansyah, anggota Komisi IV DPRD Kukar.

Namun, Zulfiansyah juga menyadari bahwa pengadaan buku pelajaran

secara gratis tidak dapat dilakukan, mengingat setiap tahun terjadi perubahan kurikulum yang akan membuat buku-buku lama menjadi tidak relevan. Berbeda halnya dengan seragam sekolah, yang tetap digunakan setiap tahun dan tidak mengalami perubahan signifikan.

"Kami menyadari bahwa pemberian buku pelajaran secara gratis tidak memungkinkan, mengingat setiap tahun ada perubahan kurikulum. Namun, seragam sekolah adalah kebutuhan yang tetap dan tidak berubah setiap tahun," tambahnya.

Oleh karena itu, Zulfiansyah berharap Disdikbud Kukar dapat segera menyusun regulasi yang diperlukan agar seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari seragam sekolah hingga biaya pendaftaran, dapat menjadi gratis. Dengan adanya peningkatan nilai APBD tahun 2023, ia yakin bahwa hal ini dapat terwujud.

"Kami terus memantau perkembangan ini, dan kami berharap bahwa dengan APBD yang besar, kami dapat menggratiskan berbagai kebutuhan pendidikan. Kami juga berharap sekolah dapat membantu dalam penyediaan seragam sekolah," tutupnya. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Agus Susanto



ISTIMEWA

Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Restu Irawan.

Dinas PU Kukar Gelontorkan Rp 49 Miliar untuk Jalan Trans Kahala-Tabang

TENGGARONG - Peningkatan infrastruktur interkoneksi antar wilayah, terus dilakukan pada 2023. Menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), dalam memberikan peningkatan akses mobilitas masyarakat. Salah satunya di daerah hulu, menasar Jalan Trans Desa Kahala menuju Kecamatan Tabang.

Jalan sepanjang 7,6 kilometer yang diseminasi, dengan anggaran total mencapai Rp 49 miliar yang berasal ada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2023. Terbagi dalam dua titik pengerjaan, 5,6 km di ruas Desa Kahala dengan nilai anggaran Rp 32 miliar. Dan 2 km di ruas Desa Sebelimbingan senilai Rp 17 miliar.

Ini melanjutkan perbaikan Jalan Poros Desa Kahala yang dikerjakan terlebih dahulu pada tahun 2022, dengan nilai anggaran Rp 35,3 miliar. Terbagi dalam pengaspalan sepanjang 6 km senilai Rp 32,5 miliar, dan Rp 2,3 miliar sisanya untuk penerapan sisi-sisi jalannya sepanjang 200 meter.

"Pada tahun ini dilakukan di dua titik berbeda," ungkap Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Kukar, Restu Irawan.

Restu memastikan, peningkatan infrastruktur

jalan akan terus dilakukan di daerah hulu. Bahkan ia menyebut peningkatan infrastruktur jalan bakal dilanjutkan kembali pada tahun selanjutnya. Dimana menasar Jalan Trans Kecamatan Kenohan menuju Kembang Janggut, karena masih menyisakan jalan sepanjang 8 km untuk diperbaiki dan disemenisasi.

"2 km di ruas Desa Kahala dan 6 km di ruas Desa Sebelimbingan (Kecamatan Kota Bangun). Insya Allah akan kita kerjakan pada tahun depan," lanjutnya.

Konektivitas antar wilayah, memang menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkab Kukar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.

Jalan trans yang menghubungkan tiga kecamatan, Kecamatan Kenohan-Kembang Janggut-Tabang ini merupakan jalan sentral, dikarenakan menjadi jalur transportasi utama. Untuk diketahui, selama ini ruas jalan tersebut kerap rusak karena dilanda banjir. Sehingga peningkatan infrastruktur jalan ini sangatlah didambakan oleh masyarakat. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Agus Susanto



Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono (Rafi'i/Media Kaltim)

Pemkab Kukar Terbitkan Surat Edaran Penyediaan Bak Penampungan Air Saat Belimbur

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait permohonan penyediaan tempat air dan gayung pada acara Belimbur, yang akan berlangsung pada Minggu (1/10/2023) mendatang. Belimbur sendiri merupakan salah satu acara puncak dari rangkaian Erau Adat Pelas Benua.

Sebanyak 67 pihak telah ditetapkan untuk menyiapkan bak penampungan air dan gayung. Mereka berasal dari perangkat daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unit kerja dari sektor perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan daerah (perusda).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menjelaskan, "Setiap pihak diwajibkan untuk menyediakan 2 tempat air bersih berkapasitas besar dan 5 buah gayung yang akan digunakan pada acara Belimbur."

Nantinya, setiap bak penampungan air dan gayung yang disiapkan akan dijaga oleh 20 orang yang berasal dari perangkat daerah atau unit kerja yang bertanggung jawab atas persiapan. Tempat-tempat ini akan tersebar sepanjang jalur Sungai Mahakam, yaitu di Kepala Benua (depan Kantor Bupati Kukar), Tengah Benua (depan Museum Mulawarman), dan Ekor Benua

(Kelurahan Baru).

Sunggono berharap bahwa setiap OPD dan unit kerja dapat menyiapkan bak penampungan air dan gayung pada Minggu (1/10/2023) antara pukul 07.00-08.00 WITA.

Selain itu, Sunggono juga mengimbau agar masyarakat dapat menjaga adat dan tradisi selama pelaksanaan Belimbur, yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 WITA. Ia juga mengharapkan agar OPD dan unit kerja yang telah ditunjuk dan bertanggung jawab atas peralatan dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi potensi penyimpangan.

"Kami mengharapkan agar mereka dapat menjadi contoh yang baik (role model) bagi masyarakat dalam pelaksanaan Belimbur. Mereka juga diharapkan memberikan teguran secara santun dan humanis kepada masyarakat yang melakukan Belimbur yang tidak sesuai dengan Tata Krama Adat Belimbur Erau Adat Pelas Benua serta menginformasikan kepada Pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan pihak berwenang terkait pelanggaran yang tidak dapat ditangani secara langsung di lapangan," tutup Sunggono. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Agus Susanto



Peserta berkompetisi dalam Lomba Perahu Naga sebagai bagian dari rangkaian Erau Adat Pelas Benua.

Pembinaan Usia Muda, Dispora Kukar Gelar Lomba Perahu Naga di Erau Adat Pelas Benua

TENGGARONG - Untuk meriahkan Erau Adat Pelas Benua tahun 2023, lomba balap perahu naga kembali digelar. Dalam rangkaian ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara (Dispora Kukar) berkolaborasi dengan Persatuan Olahraga Dayung Indonesia (PODSI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan empat nomor lomba selama 3 hari, yakni mulai tanggal 28 hingga 30 September 2023.

Keempat nomor lomba yang diperlombakan meliputi Perahu Naga Pelajar 12 Pedayung Putra, Perahu Naga Pelajar 12 Pedayung Campuran, Perahu Naga 12 Pedayung Umum, dan Gubang Lunas Ganda Putra Umum.

Lomba yang diselenggarakan

di anak Sungai Mahakam, yang terletak sepanjang Jalan S Parman, menarik minat masyarakat untuk menyaksikan adu cepat di jalur sungai ini.

Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Dispora Kukar, Zukran, mengungkapkan, "Lomba dayung yang kita selenggarakan hari ini adalah bagian dari program cabang olahraga (cabor) dari PODSI Kaltim. PODSI telah merencanakan kegiatan ini jauh-jauh hari sebelumnya."

Zukran menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan olahraga dayung di Kukar. Semua peserta lomba adalah atlet muda, dengan harapan bahwa pengalaman ini akan meningkatkan ke-

mampuan mereka sebagai atlet masa depan.

Prestasi dayung Kukar telah mencapai tingkat yang mengesankan, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bahkan, Kukar telah menghasilkan dua atlet dayung yang berhasil meraih medali untuk Tim Nasional (Timnas) Sea Games.

"Ini adalah hasil dari aspirasi salah satu anggota dewan kita, Bapak Rasid (ketua DPRD Kukar), yang juga memainkan peran penting dalam pembinaan olahraga dayung di Kukar. Lomba ini juga merupakan bagian dari perayaan budaya Erau," tambahnya. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Agus Susanto



PERSIAPKAN AKUISISI ARSIP STATIS, BKPSDM TERIMA KEDATANGAN TIM MONITORING DPK BONTANG

BACA HALAMAN A2



Kenalkan Wisata Melalui Pembangunan Infrastruktur, Dinas PUPRK Gelar Lomba Video Pendek



Persiapkan Akuisisi Arsip Statis, BKPSDM Terima Kedatangan Tim Monitoring DPK Bontang

BONTANG - Dalam rangka persiapan Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis, yang merupakan proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari BKPSDM Kota Bontang, selaku pencipta arsip, kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

Pada Kamis, 21 September 2023, dilaksanakan monitoring untuk memeriksa kesesuaian arsip yang ada tersebut agar dapat dilanjutkan dengan proses lebih lanjut. Rombongan DPK Kota Bontang, dipimpin Yuanita Suryadi, S.I.Kom, selaku Arsiparis Ahli Muda.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis.

Lembaga kearsipan berkewajiban melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,

dan perseorangan, termasuk lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri.

Pelaksanaan akuisisi arsip statis nantinya merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring keberadaan arsip yang memiliki potensi arsip statis yang berada di lingkungannya.

Monitoring dilakukan dengan cara penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip, dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan akuisisi arsip oleh lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan harus melaksanakan akuisisi arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dalam kegiatan akuisisi yang dilakukan ini merupakan cara penelusuran arsip yang memiliki potensi arsip statis di lingkungan pencipta arsip (creating agency) dan pemilik arsip (owner). Penilaian arsip statis merupakan proses penentuan status arsip yang layak untuk diakuisisi.

Verifikasi dilakukan terhadap arsip statis yang tercantum di dalam JRA yang

berketerangan di permanenkan serta terhadap arsip yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BKPSDM Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si, menyambut baik kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh DPK ini. Menurutnya, BKPSDM memiliki potensi arsip berupa foto-foto lama yang tersimpan dalam album.

Foto-foto ini merekam kegiatan atau peristiwa tempo dulu yang dilaksanakan masyarakat bersama pegawai BKD/BKPP/BKPSDM. Kami tentu berharap bahwa dengan pelaksanaan akuisisi arsip statis ini, dapat memberikan akses yang lebih luas bagi semua pihak yang membutuhkannya melalui prosedur yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

Sudi menambahkan bahwa pihaknya akan menunggu hasil kesimpulan dari DPK setelah proses monitoring selesai dilaksanakan. (ADV)



SYAKURAH/RADARBONTANG

Opening ceremony lomba video objek wisata di Halaman Parkir Bontang Kuala.

Kenalkan Wisata Melalui Pembangunan Infrastruktur, Dinas PUPRK Gelar Lomba Video Pendek

BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kota (PUPRK) Bontang melaksanakan opening ceremony kegiatan lomba video objek wisata Malahing, Pasilan, Beras Basah dan Pulau Sejah, Jumat (29/9/23) di Halaman Parkir Bontang Kuala.

Kepala Dinas PUPRK, Usman menjelaskan, bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kota Bontang, karena sejauh ini pembangunan Kota Bontang belum ada kemandirian.

"Selama ini uang untuk pembangunan Kota Bontang selalu bagi hasil, sementara gas dan batu bara perusahaan-perusahaan di Bontang sebentar lagi akan habis," ucapnya dalam sambutan.

Hal tersebut dinilai dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Oleh sebab itu pemkot telah mencanangkan peningkatan sektor pariwisata. Maka Dinas PUPRK pun ikut berperan aktif dalam pariwisata dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pariwisata.

"Hal seperti ini harus ada konektivitas, makanya kami melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan tupoksinya," imbuhnya.

Contoh pembangunan yang akan dikerjakan berupa terminal pelabuhan serta penyediaan air bersih untuk wilayah pesisir.

Ada beberapa lokasi yang memiliki keunggulan, namun masyarakat Kota Bontang sendiri belum mengetahui, untuk ini dengan adanya lomba video

pendek ini bisa menjadi acuan untuk mengabarkan lokasi-lokasi yang indah, namun belum terekspos.

Besok, mereka akan melakukan snorkling di wilayah Pasilan dan Beras Basah, untuk membuktikan keindahan Pasilan tidak kalah dari daerah-daerah lain seperti Maratua, Bunaken, dan Derawan.

"Dengan adanya lomba ini nantinya Pasilan bisa diolah, dan kita akan berkolaborasi dengan provinsi juga, jadi bisa ada penginapan, snorkling juga," tambahnya.

Total hadiah mencapai Rp 30 juta dengan penerima lomba juara 1 hingga juara harapan, dengan tema 'Peran Dinas PUPR Mendukung Infrastruktur Destinasi Wisata.' Pengambilan video akan dilakukan serentak. Peserta berasal dari wilayah Bontang dan Balikpapan.

Wali Kota Bontang diwakili Asisten II, Lukman menjelaskan, bahwa lomba ini merupakan upaya nyata Pemkot Bontang untuk mendorong ekonomi kreatif masyarakat, serta mempromosikan objek-objek keindahan yang ada di Kota Bontang.

"Setelah kita mendapatkan juara 3 Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, akan ada kunjungan kerja dari 33 kabupaten/kota se-Kalimantan pada November mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa wisata di Kota Bontang dapat bersaing dengan wilayah lain," tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Aiptu Rusmana saat menerima penghargaan kenaikan pangkat pengabdian.

Satu Anggota Polres Bontang Terima Penghargaan Kenaikan Pangkat Pengabdian

BONTANG – Aiptu Rusmana mendapat kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, Kamis (31/8/2023). Kenaikan pangkat tersebut didapat atas dedikasi dan loyalitas selama menjadi anggota Polri.

Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian digelar di halaman Mapolres Bontang. Dipimpin oleh Waka Polres Bontang serta dihadiri para PJU, Personil Polres Bontang, dan Bhayangkari cabang Bontang.

Personel penerima kenaikan pangkat pengabdian Aiptu Rusmana menjabat sebagai Kanit Bhabinkamtibmas Sat Binmas Polres Bontang saat ini menyandang pangkat Ipda.

Kapolres Bontang melalui Kabag Sumda AKP H. M Slamet mengatakan, bahwa kenaikan pangkat pengabdian merupakan kenaikan pangkat efektif yang diberikan kepada anggota Polri menjelang pensiun.

Kenaikan pangkat ini diberikan minimal tiga bulan sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

"Tidak semua personel Polri mendapat kenaikan pangkat pengabdian," ungkapnya mengutip dari Polresbontang.com.

Hal ini tidak terlepas dari penilaian aspek moral, mental, kepribadian, kemampuan, prestasi kinerja, melaksanakan tugas tanpa catatan pelanggaran selama berdinis, serta dapat dijadikan suri tauladan bagi personel lainnya.

"Kenaikan pangkat pengabdian adalah salah satu wujud penghargaan dari pimpinan dan institusi Polri kepada anggota yang berdedikasi, serta mempunyai loyalitas yang tinggi dengan dibuktikan pelaksanaan dinas yang baik, serta tentunya tanpa catatan pelanggaran selama aktif berdinis," jelas dia.

Editor: Yusva Alam



YUSVA ALAM

Anggota Komisi III DPRD Faisal mengingatkan agar pembebasan lahan pemakaman Bontang Barat terealisasi.

Pemkot Bakal Bebaskan Lahan Pemakaman Bontang Barat, Faisal: Jangan Sampai Wacana Lagi!

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mengaku bersyukur dengan adanya informasi pembebasan lahan pemakaman di Kecamatan Bontang Barat. Diharapkan dengan adanya pembebasan lahan pemakaman tersebut, proses pembangunan pemakaman bagi warga di Bontang Barat semakin terwujud.

Walaupun bersyukur dengan informasi tersebut, dirinya juga menegaskan agar Pemkot Bontang benar-benar merealisasikan pembebasan lahan pemakaman itu. Lantaran wacana pembangunan lahan pemakaman di Bontang Barat itu sudah terlalu lama belum terealisasi.

"Jangan sampai hanya wacana-wacana lagi. Kali ini harus benar-benar terealisasi," tegasnya.

Pihaknya merasa kasihan dengan warga di Bontang Barat, lantaran selama ini masih menumpang lahan di wilayah Kutim untuk memakamkan warga yang meninggal dunia.

Semoga dengan semakin terealisasinya lahan pemakaman Bontang Barat, warga akan semakin dimudahkan dalam pemakaman.

"Saya mau lihat buktinya kalau benar pembebasan lahan. Ini masalah bukan setahun dua tahun, sudah terlalu lama. Kasihan warga Bontang Barat," imbuhnya.

Diberitakan, kepastian pembebasan lahan pemakaman di Bontang Barat akan dilakukan Pemkot Bontang pada 2024 mendatang.

Lahan yang ditentukan berada di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di belakang Musala Babussalam. Lahan yang akan dibebaskan berkisar 5,1 hektar.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang Edy Prabowo mengatakan, pada APBD-P 2023 ini sedang menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). (al/adv)

Genting Kekerasan Perempuan dan Anak di Bontang

Bisa dikatakan genting kasus kekerasan perempuan dan anak di Bontang. Hal itu terungkap dari catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), yang terhitung awal tahun ini sampai Agustus telah menangani 87 kasus. Dari 87 kasus tahun itu tercatat 36 kasus terjadi pada perempuan dan 51 kasus terjadi pada anak.

Kasus yang terjadi pun beragam. Mulai dari kekerasan fisik seperti KDRT, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual pada anak maupun perempuan. Mesti demikian, tingginya kasus yang ditangani juga bisa diartikan sebagai proses kesadaran masyarakat yang berani untuk bersuara.

Wakil Wali Kota Bontang Najirah pun mengaku cukup prihatin mendengar tingginya kasus kekerasan yang ditangani DPPKB. Untuk itu, ia meminta DPPKB gencar melakukan pencegahan dengan melibatkan sekolah.

Menurutnya pencegahan harus maksimal dilakukan sejak dini. Lantaran ia menyadari kasus kekerasan itu timbul malah dari orang-orang terdekat korban. Semua elemen warga diharapkan sadar. Termasuk pendidikan seksual kepada anak sejak dini.

Kekerasan Buah dari Sistem

Tidak dapat dipungkiri kekerasan perempuan dan anak merupakan persoalan genting yang seharusnya bisa ditangani. Berbagai regulasi dan solusi dilakukan oleh pemerintah namun kasus kekerasan terus meningkat.

Tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak meski terjadi dalam ranah keluarga, namun dari sisi upaya pencegahan dan perlindungan membuktikan negara gagal melindungi perempuan dan anak. Sejatinya tak cukup hanya gencar melibatkan sekolah dengan pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Namun butuh nyata peran masyarakat dan negara.

Pendidikan seksual kepada anak sejak dini pun jika tidak dibarengi dengan sistem kehidupan yang mendukung juga akan sia-sia. Berbagai produk hukum, edukasi hingga munculnya berbagai badan dan lembaga/organisasi untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sudah dilakukan. Namun faktanya kekerasan yang terjadi saat ini genting bahkan bisa menimpa laki-laki sebagai korban.

Jika dicermati masalah kekerasan hanya dipandang dan solusinya berdasarkan perspektif gender, yakni perjuangan perempuan maka masih belum tepat. Semua berpotensi bisa menjadi pelaku kekerasan dan semua bisa menjadi incaran korban kekerasan. Artinya tidak tepat kegentingan kekerasan perempuan dan anak karena ketimpangan gender.

Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak



Oleh:

**Rahmi Surainah,
M.Pd**

*Alumni Pascasarjana
Unlam Banjarmasin*

merupakan akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang mengagungkan kebebasan, menghalalkan segala cara dan mencampakkan peran agama dalam mengatur kehidupan (sekuler). Sistem inilah yang akhirnya membawa negeri ini dirundung banyak permasalahan termasuk dalam masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Persoalan kekerasan merupakan persoalan sistematis, artinya ada beberapa disfungsi dari penerapan kehidupan saat ini yang gagal melindungi perempuan dan anak. Yakni orang tua dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan lemahnya aturan negara.

Kekerasan pada perempuan dan anak perlu peran negara dalam hal preventif dan kuratif. Negara harus mencegah kekerasan seksual terjadi dengan mengkondisikan sistem yang ada agar kekerasan tidak terjadi. Selain itu perlu tiga pilar yang saling berkorelasi yakni ketakwaan individu, kontrol masyarakat melalui amar makruf nahi munkar dan penerapan aturan negara.

Islam Ajarkan Kelembutan

Salah satu teladan dalam Islam yang harus kita jadikan panduan dalam hidup adalah meneladani kelembutan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendorong kaum mukminin agar berlemah lembut kepada keluarga dan anak-anak.

Rasulullah SAW bersabda:

"Jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagi suatu keluarga, Dia menumbuhkan kelembutan pada diri mereka" (HR Abi ad-Dunya).

Banyak ayat dan hadis yang memuji sifat lemah lembut. Allah dalam firman-Nya berkata, "Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (QS Ali Imran:159).

Islam mengharamkan setiap bentuk kekerasan terhadap semua makhluk, apalagi terhadap sesama manusia, termasuk perempuan dan anak. Islam telah menetapkan adanya sanksi tegas untuk setiap kekerasan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai penebus (jawabir), tetapi juga pencegah (jauzir).

Dengan penerapan Islam kekerasan terhadap perempuan dan anak akan teratasi. Islam akan mengkondisikan sistem kehidupan mulai dari sistem ekonomi, sosial pergaulan, pendidikan, dan hukum termasuk media agar sesuai Islam, berbuah kebaikan dan terhindar dari konten kekerasan.

Demikianlah Islam sempurna menutup celah pintu kekerasan, sudah saatnya kegentingan kekerasan ini berganti dengan sikap kelembutan.

Wallahu'alam



Pertemuan posyantek di Kelurahan Satimpo.

Kelurahan Satimpo Aktifkan Posyantek, TTG Mulai Dikembangkan

BONTANG – Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG). Salah satunya terdapat di Kelurahan Satimpo yang akan menjadi pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.

Lurah Satimpo, Maryono mengungkapkan, Posyantek ini bertujuan mewadahi hasil dari kreatifitas warganya yang bisa dijadikan TTG. Tidak hanya warga, tapi posyantek ini juga melibatkan anak-anak sekolah yakni Yayasan Vidatra yang kebetulan menjadi bagian dari Kelurahan Satimpo.

“Posyantek di Kelurahan Satimpo sudah dibangun sejak tahun lalu, namun baru diaktifkan lagi sekarang,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya sudah mulai mengadakan pertemuan dengan segenap pengurus untuk memulai jalannya posyantek tersebut.

Sebagai langkah awal, Kelurahan Satimpo memberikan penyuluhan serta melakukan studi banding ke Posyantek Teliha yang menjadi

Juara 1 Nasional di Lampung tahun 2023 ini.

Hal itu dilakukan agar Satimpo memiliki gambaran dan bisa mengambil ilmu dalam mengembangkan Posyantek, dan bisa mengikuti Lomba TTG tahun 2024 mendatang.

“TTG dari Satimpo misalnya batik ecoprint, penyiraman bunga satu keran menggunakan timer, pengolahan makanan khas Bontang, alat penyedot lebah madu, alat porilisis (hasil pembakaran plastik menjadi BBM),” jelasnya.

Adapun tujuannya agar karya-karya yang termasuk dalam TTG bisa ditampung jadi satu di pameran Expo TTG mendatang, bahkan untuk mengikuti lomba. Ia berharap, Posyantek ini akan terus berjalan agar dapat mengoptimalkan SDA di Kota Bontang.

“Posyantek juga memiliki banyak manfaat, seperti memajukan ekonomi, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



DPRD BERAU IKUT WORKSHOP DAN BIMTEK PELAKSANAAN ANGGARAN DAN ETIKA KOMUNIKASI POLITIK



**ABDUL WARIS DUKUNG PELESTARIAN
OLAHRAGA TRADISIONAL**



Suasana Workshop dan Bimtek Pelaksanaan Anggaran dan Etika Komunikasi Politik

DPRD BERAU IKUT WORKSHOP DAN BIMTEK PELAKSANAAN ANGGARAN DAN ETIKA KOMUNIKASI POLITIK

TANJUNG REDEB - Sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Berau mengikuti workshop dan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dalam pelaksanaan fungsi anggaran serta etika komunikasi politik.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, wakil rakyat yang dipilih secara langsung berdasarkan asas demokrasi yang dilaksanakan secara jujur dan adil sangat memerlukan pemahaman dalam proses pembahasan anggaran. Mulai tingkat pemahaman mengenai proses penyusunan, pembahasan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

"Sehubungan dengan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang, baik secara individual maupun institusional," ungkapnya.

Lanjutnya, peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam

mengawal lembaga eksekutif serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang partisipatif dalam mengangkat dan menyejahterakan masyarakat.

"Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis, maka setiap anggota dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka turut serta menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Dirinya menyebut, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pemahaman, kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD Berau.

"Ini juga upaya kami dalam memahami setiap aturan yang terus mengalami perubahan dan dinamika," katanya.

Dengan memahami aturan secara baik dan benar, Dirinya percaya bisa mengemban tugas dengan baik sesuai dengan apa yang telah dipikul di pundak masing-masing dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Saya mengajak kepada seluruh anggota agar dapat

mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian agar mampu menumbuhkan kembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku sebagai wakil masyarakat dalam mengelola sistem penganggaran yang akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Terlebih kesiapan dalam menghadapi Pemilu tahun depan," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Madri mewakili seluruh anggota DPRD Berau berterima kasih kepada Pengurus Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (AD-KASI) beserta jajarannya, para narasumber dan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

"Harapan kami, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran, menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan bagi kami untuk dapat bekerja, berbuat, berjuang, dan menuntaskan aspirasi masyarakat," pungkasnya. (adv)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

MADRI PANI TEGASKAN ASN JANGAN TERLIBAT POLITIK PRAKTIS

TANJUNG REDEB - Menjelang pesta demokrasi, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengingatkan para ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Dia menegaskan, ASN harus melayani masyarakat dengan maksimal. Jangan sampai ada hal-hal yang dilakukan terlihat sensitif hingga memicu timbulnya konflik.

"Jika ASN terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik, tentu dapat merugikan dirinya sendiri," ungkapnya.

Madri menerangkan, jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

"Jadi jelas, ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye atau sekedar dukung atau memperkenalkan calon peserta pemilu. Sebaliknya ASN harus sesuai dengan pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemer-

intahan," tegasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu menilai, jika ASN tidak netral maka akan terjadi diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan fan ASN menjadi tidak profesional.

"Sehingganya pengawasan yang kuat dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN dalam Pemilu nanti," katanya.

Kendati demikian, Madri menambahkan, netralitas ASN sangat memengaruhi rangkaian pesta demokrasi, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif. Tujuannya agar dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan.

"Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Fokus jalankan tugas sebagai ASN," tandasnya. (adv/set)



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

WARIS TEGASKAN PEMERATAAN FASILITAS AIR BERSIH HARUS DIREALISASIKAN

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris meminta pemerataan fasilitas air bersih hingga ke kampung terjauh dari pusat perkotaan direalisasikan.

Dia membeberkan, saat ini masih banyak kampung yang belum menikmati fasilitas air bersih. Untuk di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, yakni Kampung Kasai, Batu Putih dan Talisayan.

“Untung saja ada ADK. Berkat itu, pihak pemerintah kampung dapat menganggarkan untuk pengadaan sumur bor agar dapat menikmati air bersih,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, anggaran yang digelontorkan untuk target 25 ribu Sambungan Rumah (SR) kurang dari Rp 100 miliar. Sementara, untuk drainase mencapai Rp 300 miliar.

“Padahal, drainase itu tidak masuk dalam program prioritas kepala daerah. Ini yang sangat disayangkan,”

ujarnya.

Dirinya memaparkan, kasus Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kampung Tabalar Ulu seharusnya dapat menjangkau Kampung Tubaan. Terlebih, jaraknya hanya sekitar 7 kilometer.

“Kalau hanya sampai Tabalar Ulu, jumlah permukiman masih sedikit. Kalau dikelola PDAM, itu rugi katanya. Sementara dikelola kampung, gak sanggup karena tidak ada operasional. Tapi kalau kita bangun sampai ke Tubaan, tinggal menambah pipa,” bebernya.

Politikus Demokrat ini berharap agar sarana pengolahan air bersih di Tabalar Ulu dapat menjangkau Kampung Tubaan. Terlebih Kampung Tubaan merupakan ibukota Kecamatan Tabalar.

“Jangan kita membangun banyak intake tapi tidak maksimal. Lebih baik intake yang ada diperluas jangkauannya,” pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

PERDA PENGARUSUTAMAAN GENDER, DARLENA: PEMBANGUNAN HARUS LIBATKAN PEREMPUAN

TANJUNG REDEB - Disahkannya peraturan daerah (Perda) pengarusutamaan gender menjadi perhatian serius Anggota DPRD Berau, Darlena. Aturan itu diharapkan memperkuat kesetaraan gender yang diimplementasikan di seluruh instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terutama dalam pelaksanaan pembangunan.

Ia berharap, seluruh instansi dapat didorong untuk lebih peduli. Terkadang pembangunan saat ini hanya menyangkut aspek umum dengan tidak kesetaraan gender. Padahal, semua manusia memiliki hak yang sama tanpa ada perbedaan. Baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, bahkan anak-anak harus mendapatkan porsi sama seperti perlindungan dan apa saja yang menjadi hak-hak mereka.

"Dengan adanya perda ini, kami berharap Berau mampu menjadi stimulan pendorong adanya program-program ter-

hadap pengarusutamaan gender yang hadir di setiap instansi-instansi. Sebagai wujud dari program pengaplikasian tanpa ada perbedaan," harapnya.

Lanjut politisi Partai Nasdem ini, pemerintah harus berkomitmen membangun pengarusutamaan gender. Sudah saatnya perempuan memanfaatkan ruang yang telah terbuka dengan sebaik-baiknya. Beberapa kebijakan mulai memperlihatkan suatu kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Berau.

Mencapainya, sebut Lena, terbangun evaluasi dan sharing pengalaman dalam pelaksanaan strategi di masing-masing OPD. Harus benar-benar diimplementasikan dalam perencanaan kinerja. Sehingga tercapai hasil pembangunan yang berdampak pada perubahan bagi masyarakat, khususnya perempuan.

"Terpenting, implementasi pengarusutamaan gender hasilnya dapat langsung dirasakan

oleh masyarakat," sebutnya.

Selain itu, OPD juga dituntut membuat inovasi yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Inovasi tersebut merupakan ide program yang berbeda dari daerah lainnya.

"Perlu komitmen kuat dari semua untuk dapat melaksanakan pembangunan yang sifatnya responsive terhadap kesetaraan gender," ujarnya.

Ia menambahkan, kesetaraan gender tidak hanya menyamakan kedudukan, namun juga melibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, penyusunan program dan strategi yang akan dilakukan untuk membangun Kabupaten Berau.

"Perda pengarusutamaan gender menjadi strategi yang sangat diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan dan pelibatan perempuan di seluruh proses pembangunan," tandasnya. (adv/set)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

PERDA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG TELAH DISAHKAN, FALENTINUS SEBUT KEGIATAN SOSIAL HARUS IKUTI ATURAN

TANJUNG REDEB - Peraturan Daerah (Perda) tentang pengumpulan uang dan atau barang telah disahkan oleh Pemkab Berau dan DPRD Berau beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo menuturkan, dengan telah disahkannya Perda tersebut, maka pemungutan uang dan barang oleh kelompok sosial maupun lainnya, sudah tidak bisa dilakukan begitu saja.

"Jadi pengumplan uang atau barang tersebut harus mengikuti aturan yang ada. Perda ini dibuat agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan tertib dan jelas peruntukannya," ungkapnya.

Dia menyebut, beberapa tahun terakhir banyak organisasi, kelompok maupun komunitas sosial di Kabupat-

en Berau yang melakukan aktivitas pengumpulan uang dengan cara sumbangan.

"Maka dari itu memang perlu dibuatkan peraturan daerah, dengan tujuan sebagai penertiban, pengawasan dan juga agar jelas pertanggungjawabannya," imbuhnya.

Dengan adanya Perda tersebut juga diharapkan dapat membantu terjadinya hal-hal tidak diinginkan dalam proses pengumpulan uang dan barang oleh kelompok-kelompok sosial maupun lainnya.

"Semoga saja Perda ini bisa diterapkan dengan baik dalam proses pelaksanaannya, terutama tentang transparansi dan peruntukkan penggunaan dana yang dikumpulkan, agar lebih jelas dan terukur," pungkasnya. **(adv/set)**



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

SURIANSYAH DORONG JALAN USAHA TANI DIPRIORITASKAN

TANJUNG REDEB – Infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi penopang roda perekonomian masyarakat, khususnya kepada jalan usaha tani. Terlebih, hingga kini juga masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas penunjang pertanian tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mengatakan, masih banyaknya jalan usaha tani yang belum terpenuhi di beberapa wilayah tersebut harus menjadi target yang segera dipenuhi oleh pemerintah.

“Masyarakat juga berharap agar jalan usaha tani dapat dipenuhi. Apalagi hal ini juga sebagai kebutuhan utama,” ungkapnya.

Dia menilai, kebutuhan jalan usaha tani itu dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat. Terlebih jika di suatu wilayah ke-

banyak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

“Jadi permintaan mengenai jalan usaha tani ini juga merupakan permintaan masyarakat di banyak kampung yang warganya dominan sebagai petani,” terangnya.

Politikus Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyebut, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak merealisasikan jalan usaha tani itu. Pasalnya, sektor pertanian di kabupaten paling utara Kaltim ini menjadi salah satu sumber utama sebagian besar masyarakat.

“Jadi saya harap dapat direalisasikan dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan baiknya seluruh fasilitas penunjang, saya yakin pertanian kita bisa lebih baik,” pungkasnya. **(adv/set)**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

PENGURANGAN JADWAL TERBANG BATIK AIR KE BERAU, KOMISI II DPRD BERAU SEBUT PIHAK TERKAIT LAKUKAN BLOCK SEAT

TANJUNG REDEB – Penurunan jam terbang maskapai Batik Air dengan rute Berau-Jakarta dan Berau-Surabaya disoroti Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

Diketahui, penurunan frekuensi terbang Batik Air ke Bandara Kalimantan berlatik mulai Selasa (26/9/2023). Penerbangan sebelumnya dilakukan setiap hari, namun saat ini hanya hari Selasa, Rabu, Jumat dan Minggu.

Nurung sangat menyayangkan pengurangan rute penerbangan Batik Air. Belum sebulan beroperasi, tetapi harus mengurangi jadwal keberangkatan dari sebelumnya setiap hari menjadi empat kali dalam seminggu.

“Saya lihat dari statemen maskapai ada pengurangan jadwal. Dari seminggu menjadi empat hari. Sangat disayangkan belum satu bulan sudah mengalami penurunan,” katanya.

Padahal, ungkap Nurung, kedatangan pesawat berbadan besar ini, sangat berdampak

pada efisiensi waktu. Sebab, hanya sekali berangkat menuju Jakarta atau Surabaya tanpa harus transit ke Balikpapan dahulu.

Belum lagi, kehadiran Batik Air sendiri sudah menjadi berkah bagi Kabupaten Berau, karena bisa menekan harga tiket yang terbilang cukup mahal.

“Kita akui dalam beberapa pekan ini sudah sedikit ada tahap pengurangan tarif tiket. Kedua, dari efisiensi waktu antara perjalanan Jakarta-Berau atau Surabaya itu sudah luar biasa,” ujarnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mengimbau, Pemkab Berau maupun pihak Bandara berupaya melakukan pemenuhan kuota kursi guna mengembalikan jadwal penerbangan seperti semula.

“Salah satunya dengan cara block seat. Kalau kuota terpenuhi bisa diatur kembali jadwal penerbangannya. Juga bisa lakukan kerjasama dengan pihak lainnya,” tandasnya. (adv/dez)

65 PERSEN PAD BERAU DARI PERTAMBANGAN, SYARIFATUL SEBUT EKSEKUTIF HARUS GALI POTENSI LAIN

TANJUNG REDEB – Sektor pertambangan saat ini masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau. Diketahui, sekisar 65 persen dari total keseluruhan PAD Kabupaten Berau saat ini berasal dari sektor pertambangan batu bara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menginginkan sektor perkebunan dapat perlahan melampaui sektor pertambangan.

“Kita perlu menggali sektor perkebunan dan pertanian agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada sektor pertambangan saja,” ucapnya.

Ia menyebut, pemerintah harus mengatur dengan maksimal pemanfaatan sumber PAD pada sektor di luar pertambangan, seperti perkebunan yang memiliki potensi jangka panjang.

“Kabupaten Berau ini memiliki lahan yang luas, pada sektor perkebunan dan pertanian. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin agar ke depannya Kabupaten Berau bisa mandiri dan memproduksi beras hasil petani sendiri,” katanya.

Dirinya mengaku selalu mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memerintahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengonsumsi beras lokal, tujuannya agar para petani di Bumi Batiwakkal dapat sejahtera.

“Pemkab harus mengatur itu, sehingga tidak perlu mendatangkan beras dari luar daerah lagi. Jika produksinya banyak juga bisa dipromosikan agar masyarakat Kabupaten Berau membeli beras lokal,” tuturnya.

Selain itu, Syarifatul menjelaskan, pemanfaatan potensi sektor pariwisata untuk meningkatkan



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

PAD Berau masih sangat minim, sehingga perlu ditingkatkan. Karena Berau sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata terbesar di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung hal itu, ia menilai perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk akses jalan ke wisata dan memiliki fasilitas yang bersih dan indah. Seperti sapta pesona agar bisa menarik para wisatawan lokal maupun luar daerah.

“Hal itu bisa menarik para wisatawan yang datang dan kembali kesini, membawa keluarga bahkan teman temannya agar mempunyai kenangan indah di Berau,” bebernya.

Dirinya menyebut Pemkab Berau harus menggandeng seluruh stakeholder terkait disektor pariwisata seperti, perhotelan dan restoran dan sektor penerbangan.

Dirinya menerangkan permasalahan utama terkait kurang minatnya wisatawan luar datang ke Berau, karena harga tiket pesawat yang mahal. Sehingga Pemkab Berau harus mencari solusi untuk menormalkan harga tiket tersebut.

“Hal ini yang menyebabkan wisatawan berpikir dua kali untuk datang ke Berau. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus menjadi bahan pemikiran Pemkab Berau untuk meningkatkan potensi sektor pariwisata,” ujarnya.

Syarifatul menyebut telah memanggil pihak penerbangan untuk mendatangkan pesawat berukuran besar agar harga tiket pesawat bisa turun dan relatif lebih murah.

“Akan tetapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti dari pihak penerbangan. Mungkin perlu kami panggil kembali karena banyak masyarakat yang mengeluhkan,” imbuhnya.

Kemudian, dirinya menyebut sektor lain seperti badan promosi daerah harus berkolaborasi di bawah pariwisata untuk memajukan potensi pariwisata di Kabupaten Berau.

“Saya harap, potensi pariwisata di Kabupaten Berau dapat menjadi salah satu sumber terbesar dalam meningkatkan PAD Berau, karena Kabupaten Berau memiliki potensi yang luar biasa di sektor pariwisata,” pungkasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya.

ANGGARAN UNTUK MARATUA JAZZ TELAN RP 600 JUTA, DPRD BERAU SEBUT AKAN MINTA RINCIANNYA

TANJUNG REDEB – Maratua Jazz akan kembali dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Anggaran yang digelontorkan pun tak main-main, yakni sekisar Rp 600 juta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menilai, dengan besaran anggaran tersebut, Maratua Jazz dirasa kurang pas.

Menurutnya, sebagian anggaran untuk acara musik di Pulau Maratua itu lebih baik digelontorkan untuk Manutung Jukut, yang dinikmati masyarakat luas.

“Nanti kami minta rinciannya, anggaran

Rp 600 juta itu untuk apa saja, menurut saya nilai tersebut tidak terlalu besar dan kecil, tetapi menurut hemat saya lebih baik untuk Manutung Jukut,” tuturnya.

Dia menilai, Maratua Jazz hanya dinikmati segelintir kalangan saja, sedangkan Manutung Jukut dinikmati oleh seluruh masyarakat.

“Ke depan kami akan panggil Disbudpar Berau mengenai penyelenggaraan Maratua Jazz. Nantinya revisi akan dilakukan, jika dampaknya tidak besar bagi wisata dan ekonomi masyarakat,” tandasnya. **(adv/dez)**



ABDUL WARIS DUKUNG PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu terakhir, olahraga tradisional selalu dipertandingkan di Bumi Batiwakkal. Hal itu pun direspons positif Wakil Ketua III DPRD Berau, Abdul Waris.

Dia menilai, olahraga tradisional dapat diinisiasi menjadi promosi wisata di Kabupaten Berau. Abdul Waris mengaku sangat mendukung acara yang digelar Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi). Sebab, dirasa cukup baik dalam menggalakkan pelestarian kebudayaan.

“Saya dukung event olahraga tra-

disional. Saya harap kegiatan ini bisa berkelanjutan,” katanya.

Untuk ke depan Kormi bisa berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam pemenuhan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan tersebut nantinya.

Dirinya, pelaksanaan tersebut bisa konsisten tiap tahunnya. Ditegaskannya, bila perlu akan di anggarkan khusus kegiatan olahraga tradisional kedepannya. “Lomba ini harus digalakkan. Supaya kegiatan ini tetap terjaga,” pungkasnya.

(adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

MADRI: JANGAN ADA PTT TITIPAN

TANJUNG REDEB – Rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih ada di pemerintah. Hal itu pun disoroti Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Menurutnya, PTT yang ada harus dipertahankan dan bukan malah ditambah. Lebih baik, kata Madri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperjuangkan mereka menjadi PPPK.

Dirinya menegaskan, kepala OPD harus selektif. Bukan menerima karena ada titipan. Terlebih, hal tersebut berseberangan dengan keinginan Bupati Berau, Sri Juniarshih untuk mengangkat PTT menjadi PPPK.

“PTT atau honorer titipan. Ini lucu, di tengah Pemkab Berau berupaya mengurangi PTT yang ada dengan mengangkat menjadi PPPK. Ada oknum yang menitip anak atau keluarganya menjadi PTT,” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebut, keberadaan PTT sangat vital. Terlebih jumlahnya di Berau cukup banyak. “Apalagi mengenai nasib mereka belum menentu, lebih baik jangan ditambah dulu,” tegasnya.

Madri mengaku akan mencari tahu, terkait adanya PTT atau honorer titipan. Agar nasib PTT yang sudah lama, bisa diperjuangkan menjadi PPPK.

Dia juga menegaskan bukan dirinya menolak ada PTT baru. Namun yang harus diperhatikan yakni nasib PTT yang sudah bekerja belasan tahun. Namun tidak pernah mendapat kesempatan menjadi PPPK.

“Saya miris, tidak sedikit yang mengadu. Harus ada solusinya bagi teman-teman PTT di Berau ini. Bukan menambah PTT baru,” tandasnya. **(adv/dez)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI SABTU
30 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



RSKD BALIKPAPAN SUKSES OPERASI JANTUNG TERBUKA PERTAMA DI KALIMANTAN, GUBERNUR ISRAN BERI APRESIASI



**BMKG BALIKPAPAN IMBAU WARGA
WASPADA ANGIN KENCANG DI
TENGAH MUSIM KEMARAU**



Proses operasi jantung terbuka yang dilakukan tim jantung RSKD pada Jumat (29/9).

RSKD BALIKPAPAN SUKSES OPERASI JANTUNG TERBUKA PERTAMA DI KALIMANTAN, GUBERNUR ISRAN BERI APRESIASI

BALIKPAPAN - Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) menjadi rumah sakit pertama di Kalimantan yang berhasil melakukan operasi jantung secara terbuka pada pasien jantung. Operasi ini dilaksanakan pada Jumat (29/9/2023).

Perwakilan tim bedah jantung RSKD, dr. Sukisman, Sp.BTKV, menjelaskan bahwa pada Jumat (29/9/2023) pagi sekitar pukul 08.20 WITA, RSKD telah melakukan operasi CABG (Coronary Artery Bypass Graft) atau operasi bypass arteri koroner pada pasien yang memiliki riwayat serangan jantung yang sudah lama dengan 3 bypass arteri koroner.

"Hasil operasi sangat baik, dan kami berharap bahwa dalam beberapa jam ke depan pasien akan bangun dan bernafas dengan normal, sementara perawatan biasanya akan berlangsung sekitar 6 hari dengan kondisi yang stabil," ujarnya.

Lebih lanjut, Sukisman men-

jelaskan bahwa proses operasi jantung terbuka tersebut berlangsung sekitar 3,5 hingga 4 jam, termasuk persiapan. Selama operasi, tidak ditemukan masalah atau kendala berarti, hal ini tidak lain karena dukungan peralatan yang sangat baik.

"Operasi jantung melibatkan hampir 10 tim yang terdiri dari berbagai spesialis, termasuk dokter bedah jantung, dokter anestesi kardiovaskular, dokter perfusi, penata anestesi, dan tim khusus perawatan pasca operasi bedah jantung di ICU," jelasnya.

Keberhasilan operasi jantung terbuka ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang datang langsung untuk melihatnya. Isran mengungkapkan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah terhadap rumah sakit daerah.

"Dukungan anggaran dari Pemprov sekitar Rp 500 miliar sampai selesai 100 persen pembangunan gedung jantung ter-

padu, sedang dalam proses selama sekitar 2 tahun," ujarnya.

Isran juga mengungkapkan kebanggaannya karena RSKD kini telah dilengkapi dengan satu-satunya mesin operasi hybrid dari General Electric di Amerika Serikat, yang hanya dimiliki oleh beberapa rumah sakit di Indonesia. Di Kalimantan Timur, hanya RSKD dan AWS (Syahrani) yang menyediakan operasi jantung terbuka dengan menggunakan mesin hybrid ini.

Sementara itu, Direktur RSKD, Edy Iskandar, mengatakan bahwa saat ini daftar tunggu pasien untuk operasi jantung terbuka mencapai 6 bulan ke depan. Namun, ia berharap bahwa dengan adanya mesin hybrid ini, tidak akan ada lagi daftar tunggu, sehingga pasien dapat segera mendapatkan perawatan dan harapan hidup mereka menjadi lebih tinggi.

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Ustad Das'ad Latif saat memberikan ceramah di hadapan ribuan masyarakat Kota Balikpapan.

PERINGATAN MAULID NABI DI BALIKPAPAN, USTAD DAS'AD LATIF SAMPAIKAN PESAN TOLERANSI

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung BSCC Dome Balikpapan, Jumat (29/9/2023) malam ini.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengatakan, Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menghadirkan Ustadz Das'ad Latif, sebagai kado terindah untuk warga Kota Balikpapan.

"Ini adalah kado untuk warga Kota Balikpapan. Saya harus memaksa beliau untuk hadir mengisi tausiah malam ini di tengah kesibukannya," ujar Rahmad Mas'ud.

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan bahwa dengan kesibukan Ustad Das'ad Latif dalam memberikan ceramah di seluruh penjuru nusantara, meminta warga Balikpapan bersama-sama mendoakan kesehatan sang ustad. "Mari kita bersama-sama mendoakan beliau agar diberikan kekuatan dan kesehatan," jelasnya.

Rahmad juga menyinggung tentang tahun politik di Indonesia, di mana sebentar lagi akan dilakukan pemilihan umum (Pemilu).

"Di tengah kondisi dan situasi perpolitikan saat ini, kita boleh memiliki partai atau pilihan yang berbeda. Namun, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi atau hubungan baik," tambahnya.

Selain itu, Rahmad juga memohon maaf atas pembangunan yang sedang berlangsung yang mungkin mengganggu aktivitas masyarakat Kota Balikpapan.

"Walaupun banyak pembangunan yang mungkin mengganggu aktivitas kita, saya yakin hasilnya akan kita rasakan ke depannya. Percayalah, pembangunan kota ini adalah untuk kebaikan masyarakat Balikpapan juga, terutama dalam menyambut IKN," tegasnya.

Sementara itu, Ustad Das'ad Latif, yang mengisi ceramah, membuka dengan pembahasan tentang tahun politik dan pentingnya menjaga persatuan. Dia juga menekankan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. Hingga berita ini ditayangkan, Ustad Das'ad Latif masih memberikan tausiahnya. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Prakirawan BMKG Kota Balikpapan, Dyan Novrida saat menjelaskan cuaca di Kota Balikpapan dan sekitarnya.

BMKG BALIKPAPAN IMBAU WARGA WASPADA ANGIN KENCANG DI TENGAH MUSIM KEMARAU

BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Balikpapan memprediksi bahwa musim kemarau dan cuaca panas ekstrem kemungkinan akan berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi angin kencang.

Prakirawan BMKG Kota Balikpapan, Dyan Novrida, menjelaskan bahwa fenomena Sirlain atau belokan angin telah menyebabkan terjadinya hembusan angin yang sangat kencang. Kecepatan angin saat ini di atas rata-rata normal.

"Terjadi pola Sirlain atau belokan tekanan angin. Kecepatan angin mencapai 5 hingga 10 knot dalam beberapa hari terakhir," ujarnya pada Jumat (29/9/2023).

Dyan menjelaskan lebih lanjut bahwa selain menyebabkan angin kencang, fenom-

ena ini juga dapat mengubah cuaca dengan cepat. Cuaca yang awalnya panas dan cerah dapat berubah menjadi mendung bahkan hujan lokal.

"Karena wilayah kita berada di dekat kawasan ekuator, peluang hujan lokal masih mungkin terjadi akibat pola angin tersebut," tambahnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pesisir untuk tetap waspada terhadap angin kencang. Selain itu, para nelayan yang menggunakan kapal kecil juga diingatkan untuk memperhatikan tinggi gelombang laut.

"Pada malam hari, angin di pesisir biasanya semakin kencang. Gelombang laut juga dapat mencapai ketinggian yang cukup signifikan," tambah Dyan. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Gabungan personel TNI saat melakukan aksi bersih-bersih pantai Manggar, Balikpapan Timur pada Jumat (29/9).

PEDULI KEBERSIHAN PANTAI, TNI GELAR BERSIH-BERSIH PANTAI MANGGAR

BALIKPAPAN - Gabungan personel TNI dari Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Darat (AD) bersama nelayan binaan AL dan warga sekitar menggelar aksi bersih-bersih pantai Manggar, Balikpapan Timur pada Jumat (29/9/2023).

Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut (P) Hendriman Putra, menjelaskan bahwa aksi bersih pantai ini merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan terhadap kebersihan lingkungan di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan sendiri telah sering meraih penghargaan dalam bidang kebersihan lingkungan, termasuk piala Adipura.

"Kami mengangkat isu sampah ini karena selalu menjadi masalah ketika air laut pasang dan surut. Sampah-sampah yang dibuang masyarakat melalui aliran sungai akan terdampar di pantai. Ini menjadi perhatian bersama kita," ujarnya.

Danlanal menekankan bahwa penumpukan sampah terutama yang bersifat non-organik seperti botol minuman,

kaleng, dan barang-barang lainnya dapat menjadi masalah serius jika tidak dibersihkan secara berkala.

Untuk itu, Danlanal mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan bahkan memilah jenis sampah.

"Kita memiliki pantai yang luas, sehingga kita semua seharusnya dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, terutama pantai kita. Pantai kita merupakan objek wisata yang indah dan bersih, tempat untuk berkumpul dan bersantai. Ini adalah anugerah dari Allah SWT, jadi kita harus menjaganya," tambahnya.

Aksi pembersihan sampah ini telah menjadi program bulanan bagi Lanal Balikpapan, dimana prajurit Lanal Balikpapan secara rutin mencari lokasi yang memerlukan perhatian khusus terkait masalah sampah. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



PESERTA OFF-ROAD JELAJAHI ALAM PASER, TEMPUH 65 KILOMETER MENUJU GUNUNG EMBUN

**DKISP PASER GELAR MAULID NABI
MUHAMMAD 1435 HIJRIAH, JADI
MOMENTUM EVALUASI DIRI**





Pelepasan Peserta Off-Road

PESERTA OFF-ROAD JELAJAHI ALAM PASER, TEMPUH 65 KILOMETER MENUJU GUNUNG EMBUN

PASER - Sebanyak 60 peserta off-road memacu adrenalin dengan menjelajahi pemukiman, sungai, dan hutan sepanjang 65 kilometer hingga mencapai Gunung Saing Boga atau Gunung Embun, di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, pada Jumat (29/9/2023).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-68 Lalu Lintas Bhayangkara Polres Paser, dan juga sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pasca pelantikan Indonesia Offroad Federation (IOF) Cabang Paser periode 2023-2027.

Kapolres Paser, AKBP Kade Budiarta, mengungkapkan bahwa sebanyak 60 peserta off-road yang berpartisipasi berasal dari berbagai daerah, termasuk Batulicin dan Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, dan Paser.

Kade, yang juga merupakan seorang penggemar off-road, mengajak seluruh peserta untuk tetap waspada. Ia menekankan pentingnya menjaga etika berkendara, menjaga ketertiban, serta keselamatan selama perjalanan.

"Saya ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk memperhatikan tanaman warga sepanjang jalur yang dilalui dan tetap mematuhi semua tanda-tanda di medan," kata Kade.

Kade menambahkan bahwa rangkaian kegiatan ini juga mencakup kegiatan sosial, seperti donor darah dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf, mengungkapkan bahwa meskipun pengurus baru IOF baru saja dilantik pada Kamis (28/9/2023) malam, mereka sudah menunjukkan dedikasi yang baik terhadap masyarakat.

Ia berharap kegiatan sosial dan kemanusiaan akan terus dilakukan, tidak hanya untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam, tetapi juga untuk situasi-situasi darurat lainnya.

Masitah juga menyatakan bahwa pada hari ini, semua anggota IOF akan menjelajahi wilayah Kabupaten Paser dengan cepat. Dengan demikian, ia berharap bahwa kegiatan yang diikuti oleh peserta ini dapat membantu mempromosikan potensi wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Paser.

"Selama perjalanan, nikmatilah semua rute yang dilewati, termasuk menjelajahi hutan, dan kami berharap bahwa kegiatan ini dapat mempromosikan potensi alam, seperti Gunung Embun atau Gunung Boga, serta potensi pariwisata lainnya di Kabupaten Paser," tutup Masitah.

Pewarta: Bhakti

Editor: Agus Susanto



Pelaksanaan Maulid Nabi di Kantor DKISP Kabupaten Paser

DKISP PASER GELAR MAULID NABI MUHAMMAD 1435 HIJRIAH, JADI MOMENTUM EVALUASI DIRI

PASER – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala DKISP Paser Ina Rosana, Sekretaris DKISP Paser Bambang Abdul Khaliq, para kepala bidanv dan staf DKISP, yang berlangsung di aula kantor DKISP, Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Jumat (29/9/2023).

Peringatan Maulid Nabi diawali dengan pembacaan salawat dan musik Habsyi dari Ustaz Sairaji beserta beberapa santri dari pondok pesantren Bina Iman Pasir Belengkong.

Kepala DKISP Paser Ina Rosana mengatakan, peringatan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi merupakan bentuk penghormatan pemerintah kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam (SAW).

"Pemerintah telah menetapkan 28 September 2023 atau 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah se-

bagai hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad," terang Ina.

Ditetapkannya hari itu sebagai libur nasional, agar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

"Tanggal 28 September hari maulid Nabi, pemerintah membebaskan aktivitas pekerjaan, pelayanan publik, agar bisa memperingati Maulid Nabi," ujarnya.

Peringatan Maulid Nabi di DKISP Paser ini, lanjut Ina, digelar di tengah kesibukan aktivitas para ASN. "Meski sibuk, kami sempatkan memperingati Maulid Nabi Karena kalau mengikuti pekerjaan tidak akan ada habisnya," tambahnya.

Sementara dalam ceramah yang disampaikan Ustaz Sairaji, peringatan Maulid Nabi hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. (bs)



PJ GUBERNUR KALTIM DILANTIK 2 OKTOBER DI JAKARTA,

AKMAL MALIK DIKABARKAN SUDAH PESAN BAJU UNTUK PELANTIKAN



**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**

ARIE WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
 DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

PJ GUBERNUR KALTIM DILANTIK 2 OKTOBER DI JAKARTA, AKMAL MALIK DIKABARKAN SUDAH PESAN BAJU UNTUK PELANTIKAN

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah mengeluarkan undangan resmi untuk pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yang akan dilaksanakan Senin, 2 Oktober 2023 di Sasana Bhakti Praja (SBP), Lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat. Pelantikan akan digelar pada pukul 08.00 WIB sampai selesai.

Dalam undangan resmi yang juga diterima Redaksi Mediakaltim.com, pelaksanaan pelantikan Pj Gubernur Kaltim akan digelar bersamaan dengan Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam undangan ini juga mencantumkan lampiran berupa daftar nama-nama pejabat dan tokoh penting yang diundang. Khusus Pelantikan Pj Gubernur Kaltim, Kemendagri mengundang Isran Noor selaku Gubernur Kaltim dan Hadi Mulyadi, selaku Wakil Gubernur Kaltim beserta istri.

Sementara pejabat yang diundang di antaranya seluruh Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Forkopimda Kaltim dan Bupati/Walikota se-Kaltim.

"Undangan pelantikannya memang sudah disebar dan diterima para penerima undangan. Pelantikan akan dilaksanakan 2 Oktober 2023. Pak Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Red.) sepertinya sudah ditetapkan Mendagri menjadi Pj Gubernur Kaltim. Kalau untuk surat keputusan Mendagri, salinannya baru bisa dilihat Senin (2/10) nanti," beber sumber Media Kaltim di Kemendagri. "Malah saya dengar dari Pemprov Kaltim sudah pesankan baju un-



tuk pelantikannya," sambungnya.

Seperti diberitakan, Mendagri dikabarkan telah menunjuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, sebagai Pj Gubernur Kaltim menggantikan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang masa jabatannya berakhir 30 September 2023, besok.

Sumber dari Media Kaltim di Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penunjukkan Akmal Malik sudah dapat dianggap sebagai keputusan final.

Hal ini juga diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPD RI asal Kaltim, Mahyudin, kepada Media Kaltim pada Senin (25/9). "Saya mendengar bahwa Pak Akmal yang sudah ditunjuk. Namun, saya juga belum melihat Surat Keputusannya," kata Mahyudin.

Seperti diketahui, DPRD Kaltim telah mengirimkan lima nama

sebagai usulan untuk Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim pada tanggal 8 September 2023 lalu.

Dari kelima nama yang diusulkan oleh DPRD Kaltim salah satunya adalah Dr. Akmal Malik, M.Si. Sementara empat nama lainnya yakni Drs. H. Alimuddin, M.Si (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama), Dr. Sri Wahyuni, M.PP (Sekwilprov Kaltim), dan Prof. Dr. Abdunnur, M.Si (Rektor Unmul).

Namun hingga saat ini, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengaku belum menerima kepastian mengenai siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim. Hasanuddin menyatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu keputusan dari Presiden RI yang akan dikeluarkan

Lanjutan Pj Gubernur

melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Sampai saat ini kami juga masih belum menerima kabar lebih lanjut, jadi ini masih dalam tahap penantian," ungkap Hasanuddin setelah memimpin Rapat Paripurna pada Senin, 25 September 2023 lalu.

Namun demikian, ia, yang biasa disapa sebagai "Hamas," yakin bahwa akan ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait Penjabat Gubernur Kaltim ketika masa jabatan Isran-Hadi berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023 mendatang.

"Tanggal 2 Oktober, seharusnya sudah ada keputusan, karena jika tanggal 1 Oktober jatuh pada hari Minggu, kita hanya tinggal menunggu surat dari Mendagri," tegas Politisi Golkar tersebut.

BIROKRAT BERPENGALAMAN

Berdasarkan berbagai referensi yang dikumpulkan oleh Media Kaltim, sosok Akmal Malik adalah seorang birokrat yang lahir pada 16 Maret 1970 di Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatra Barat.

Akmal telah meraih banyak prestasi cemerlang dalam karier birokratisnya. Bahkan selama satu tahun terakhir, mulai 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, Akmal dinilai sukses menjalankan amanah dari Mendagri sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Saat ini, Akmal masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, posisi yang telah diemban sejak 9 September 2019.

Akmal Malik memulai pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, di mana ia meraih gelar Diploma III pada tahun 1993.

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Institut Ilmu Pe-

merintahan (IIP) Jakarta, meraih gelar S-1 Manajemen Pembangunan pada tahun 1996.

Tidak berhenti di situ, Akmal kemudian menggapai gelar Magister Sains (S-2) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Prestasi akademiknya tak berhenti di situ, pada tahun 2021, Akmal Malik meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya.

Karier Akmal Malik dalam pelayanan publik juga mengukir banyak prestasi. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, ia telah memiliki pengalaman berharga dalam berbagai posisi kunci.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-Undangan dan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.3/5230/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Undangan

Jakarta, 28 September 2023
Yth.(Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka Pelantikan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, bersama ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

hari/tanggal : Senin / 2 Oktober 2023
pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C, Kemendagri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
pakaian : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Peci Nasional TNI/Polri : PDU IV

Dimohon untuk dapat hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Sahajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kepegawaian Setditjen Otonomi Daerah.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah dari tahun 2018 hingga 2019.

Tidak hanya dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik juga memiliki pengalaman sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Pada periode 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, ia berhasil memimpin Sulawesi Barat dengan penuh dedikasi.

Sebagai seorang birokrat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat, Dr. Akmal Malik dianggap sebagai pemimpin yang mampu menghadapi tantangan dalam mengelola otonomi daerah.

Selama masa jabatannya, ia telah berperan aktif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan yang berdampak pada kemajuan daerah dan masyarakat. (MK)

Penulis/Editor: Agus Susanto



SEMARAK KARNAVALL BATIK NUSANTARA BERSAMA KOREM 091/ASN

SAMARINDA - Accor Hotels Group Indonesia kembali meluncurkan tema tahunan dalam memeriahkan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2023.

Sebagai kota Batik, Yogyakarta dipilih menjadi tuan rumah peluncuran KarnavALL Batik Nusantara berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Tentara Nasional Indonesia.

Acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa perwakilan Hotel Accor dari area Kalimantan Timur, ulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Merepresentasikan batik dari Kalimantan, Mercure & ibis Samarinda menggandeng Korem 091/ASN beserta Persit Kartika Candra Kirana Koordcab Rem PD VI Mulawarman dalam rangkaian kegiatan yang digelar di Aula Wira Yudha pada tanggal 29 September 2023.

Acara dimulai dengan pelaksanaan olahraga bersama dan senam zumba, dilanjutkan dengan proses pembatikan, hingga lomba peragaan busana kreasi batik yang dipresentasikan oleh beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah dari sektor desain

fashion di Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Komandan Korem 091/ASN, Brigadir Jenderal TNI Yudi Ptasetiyo, S.IP., menyambut baik segala bentuk kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia mengakui bahwa hal tersebut akan membantu pertumbuhan industri kreatif dan mendorong ekonomi masyarakat. Begitu pula dengan General Manager Mercure & ibis Samarinda, Riganda Togatorop, yang berkomitmen untuk selalu mendukung segala bentuk kegiatan ekonomi kreatif di berbagai sub-sektor, sebagaimana telah dilakukan dengan rutin menggelar pameran UMKM sejak awal tahun, yang melibatkan sektor Kriya, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Kuliner, Fesyen, hingga Musik.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan kegiatan membatik bersama anggota Persit yang dipimpin oleh Syahril, pemilik UMKM Borneo Craft Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Syahril juga memperkenalkan karya batik tulisnya yang dikenal dengan

sebutan "Batik Samarinda" atau "Batik Bekesah". Motif pada batik ini menggambarkan kekayaan alam di Kalimantan Timur, yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu batu bara dan kelapa sawit.

Selain itu, terdapat juga jembatan Mahakam yang menjadi ikon kota Samarinda, serta satwa langka "Pesut Mahakam" yang saat ini hanya dapat ditemui di Desa Pela, Kota Bangun.

Setelah peluncuran Batik Samarinda, rangkaian KarnavALL Batik Nusantara ini dilanjutkan dengan perlombaan fashion show yang diikuti oleh Tentara dan anggota Persit.

Sebagai penutup, Hotel Mercure & ibis Samarinda memberikan kue ulang tahun kepada Korem 091/ASN untuk merayakan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-78 secara simbolis, yang diserahkan kepada Korps Wanita Angkatan Darat yang turut hadir dan meramaikan kegiatan ini.

Harapan ke depan adalah agar Tentara Nasional Indonesia semakin kuat dan kokoh, kompak, dan terus berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat. (rls)

Editor: Agus Susanto



ESKLUSIFNYA SAJIAN CHEF VINDEK PADA 'EXPERIENCE JOURNEY OF NUSANTARA' DI MANDALAYA RESTO FUGO HOTEL

SAMARINDA - Jumat (29/9/2023) malam ini, Mandalaya Resto di FUGO Hotel lantai 6 menjadi tuan rumah bagi puluhan tamu istimewa dalam acara Mahakam Dine Experience.

Makanan lezat dalam acara ini disiapkan dalam kolaborasi dengan seorang chef terkenal, yaitu Vindex Valentino Tengker.

Konsep dining di Mandalaya memang sangat memanjakan, dengan interior yang megah dan eksklusif. Acara ini tidak diramalkan oleh banyak tamu, sesuai dengan konsep eksklusifnya.

"Konsepnya memang sangat eksklusif dan tidak mengundang banyak orang. Sehingga pengalaman makan di sini terasa lebih istimewa," kata Fidi Hartono, Manajer Eksklusif acara ini.

Chef Vindex bukanlah sosok asing di dunia kuliner Samarinda, ia dikenal sebagai salah satu juri dalam kompetisi memasak. Ini adalah kunjungan keduanya ke Samarinda, setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata pada tahun 2004.

Chef Vindex juga menjelaskan dengan detail menu-menu yang biasanya ia sajikan. "Kami menghadirkan fine dining dengan konsep modern yang menggabungkan masakan lokal dengan sentuhan modern, tetapi tetap dipadukan dengan bahan-bahan impor," tuturnya.

Menu appetizer terinspirasi dari Manado, daerah asal Chef Vindex, dengan menu andalannya yaitu dabu-dabu yang dipadukan dengan udang dan alpukat. Tidak ketinggalan saus rica yang memberikan cita rasa khas.

Selanjutnya, ada gulai itik yang terinspirasi dari masakan Sumatra, tetapi dengan bahan utama bebek impor. "Kemudian ada menu sup yang terinspirasi dari Bali, yaitu sup bumbu lengkap khas Bali," tambahnya.

Untuk hidangan utama, ada sajian coast yang menghadirkan sentuhan gaya Barat dengan bahan terderloin khusus dan paduan semur serta saus daging sapi.

"Kami mengakhiri hidangan dengan dessert yang menggabungkan berbagai buah dengan krim keju dan kue kering beraroma kayu manis. Semua hidangan ini sebenarnya adalah menu-menu nusantara yang kami padukan dengan bahan dan menu internasional. Itulah sebabnya kami menyebutnya sebagai 'Experience Journey of Nusantara,'" paparnya.

Tidak hanya memberikan penjelasan yang lengkap, Chef Vindex juga menyambangi setiap meja tamu untuk mendengar respons dan reaksi mereka terhadap hidangan yang telah ia siapkan. "Semoga hidangan ini sesuai dengan selera dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas kunjungannya," ucapnya kepada salah satu pengunjung. (Rs1)